

# **ANALISIS SIYASAH SYAR'IYAH TERHADAP DINAMIKA KEADILAN DAN DUALITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM SERIAL ANIME ONE PIECE**

**Malisa Utami<sup>1</sup>, Arif Sugitanata<sup>2</sup>,**

<sup>1</sup>*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

<sup>2</sup>*Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, Indonesia*

Email Koresponden: [malisautami201629@gmail.com](mailto:malisautami201629@gmail.com),  
[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

## **Abstract**

*This study conducts an in-depth analysis of the representation of justice systems and the duality of law enforcement as depicted in the popular manga and anime series "One Piece" by Eiichiro Oda. Employing a literature review with Siyasah Syar'iyah theory as the theoretical framework, this research explores how concepts within Siyasah Syar'iyah can be applied to understand the complex justice system presented in this fictional world. The research is divided into two main sections: firstly, examining the representation of the justice system in "One Piece," where law is applied across various characters and situations, highlighting conflicts and compromises between personal morality and the prevailing law. Secondly, the study integrates the perspective of Siyasah Syar'iyah to analyze how these principles are applicable in the context of law and justice within the narrative. The findings indicate that, although "One Piece" is a work of fiction, its representation of the justice system and the duality of law enforcement reflects relevant justice issues in actual society. The Navy and the World Government in "One Piece" often implement actions that are absolute and monolithic, demonstrating a tendency to disregard fair legal processes and human rights. This practice conflicts with the principles of Siyasah Syar'iyah, which emphasize justice, transparency, and accountability. The study also highlights how power and social status can influence the interpretation and application of justice, as represented by Tenryuubito and Yonko, showing disparities in social and legal justice. Therefore, "One Piece" not only entertains but also provides a platform for critical discussions on justice and law enforcement, enabling reflection on real-world justice practices. This research adds a new dimension to the study of law and justice by integrating the principles of Siyasah Syar'iyah. It enriches the literature on interdisciplinary analysis between law, pop culture, and Islamic studies.*

**Keywords:** *Siyasah Shar'iyah; Justice; Law Enforcement; One Piece*

### **Abstrak**

Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap representasi sistem keadilan dan dualitas penegakan hukum yang tergambar dalam serial manga dan anime populer, One Piece karya Eiichiro Oda. Menggunakan penelitian kepustakaan dengan teori Siyasah Syar'iyah sebagai kerangka teoretis, studi ini mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep dalam Siyasah Syar'iyah dapat diterapkan untuk memahami sistem keadilan yang kompleks dalam dunia fiksi yang ditampilkan. Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama: pertama, mengkaji representasi sistem keadilan dalam One Piece, dimana hukum diterapkan terhadap berbagai karakter dan situasi dengan menunjukkan konflik dan kompromi antara moralitas pribadi dan hukum yang berlaku. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perspektif Siyasah Syar'iyah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini berlaku dalam konteks hukum dan keadilan dalam narasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun One Piece adalah karya fiksi, representasi sistem keadilan dan dualitas penegakan hukumnya mencerminkan isu-isu keadilan yang relevan dalam masyarakat nyata. Angkatan Laut dan Pemerintah Dunia di One Piece sering kali mengimplementasikan tindakan yang absolut dan monolitik, yang menunjukkan kecenderungan mengabaikan proses hukum yang adil dan hak asasi manusia. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Siyasah Syar'iyah yang menekankan keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kekuasaan dan status sosial dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan keadilan, sesuai dengan representasi Tenryuubito dan Yonko yang memperlihatkan ketimpangan dalam keadilan sosial dan hukum. Oleh karena itu, One Piece tidak hanya menghibur tetapi juga menyediakan platform untuk diskusi kritis mengenai keadilan dan penegakan hukum, memungkinkan refleksi tentang praktik keadilan di dunia nyata. Penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam studi hukum dan keadilan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah, dan memperkaya literatur mengenai analisis interdisipliner antara hukum, budaya pop, dan studi Islam.

**Kata Kunci:** Siyasah Syar'iyah; Keadilan; Penegakan Hukum; One Piece

Article history:

Received : 09/05/2024

Approved : 17/05/2023

**STIS Darussalam Bermi**

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

## **Pendahuluan**

Sistem keadilan dan dualitas penegakan hukum merupakan isu yang kompleks dan menarik dalam studi ilmu hukum. Keadilan di dalam sebuah sistem hukum merujuk pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan penegakan norma-norma yang adil bagi setiap individu di masyarakat. Konsep ini memainkan peran penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam suatu negara.<sup>1</sup> Namun, realitasnya seringkali menunjukkan adanya dualitas atau perbedaan dalam penegakan hukum, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.<sup>2</sup>

Dualitas penegakan hukum mengacu pada perbedaan perlakuan atau penerapan hukum yang tidak konsisten terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat.<sup>3</sup> Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kekuatan politik, ekonomi, atau bahkan faktor sosial dan budaya. Misalnya, ada kasus-kasus di mana orang-orang dengan kekuatan atau pengaruh tertentu dapat lolos dari konsekuensi hukum yang seharusnya mereka terima, sementara individu lain yang kurang beruntung mendapat perlakuan yang lebih keras dari sistem hukum. Situasi tersebut menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan dan penegakan hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa ada dualitas dalam penegakan hukum, mereka cenderung kehilangan keyakinan pada keadilan dan merasa bahwa hukum tidak berlaku secara merata bagi semua orang. Hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Agung Wibowo dan Arif Sugitanata, "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.

<sup>2</sup> Miftaful Murachim Budy Kushadianto dan Marsudi Dedi Putra, "Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum," *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1476–84, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>.

<sup>3</sup> Michal Tamir, "Public Law as a Whole and Normative Duality: Reclaiming Administrative Insights in Enforcement Review," *Tex. J. on CL & CR* 12, no. 1 (2006): 1–52, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1011404](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1011404).

<sup>4</sup> Arif Sugitanata dan Ihda Shofiyatun Nisa, "Analisis Masalah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 69–77, <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>.

Penelitian terdahulu telah menjelaskan bagaimana isu keadilan hukum dan dualisme hukum menjadi topik yang menarik untuk digali, seperti identifikasi yang menyatakan bahwa keadilan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada isi dari hukum itu sendiri.<sup>5</sup> Kemudian, pada konteks dualisme penegakan hukum, hukum dianggap sebagai metode yang mengandung imperatif atau larangan tentang regulasi masyarakat yang jelas diadopsi oleh masyarakat. Hukum juga dipandang sebagai serangkaian gejala sosial yang terjadi secara wajib. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma atau gejala sosial yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat dapat dikenai sanksi, termasuk kekuatan yang diberlakukan oleh pihak berwenang.<sup>6</sup> Pada sisi yang lain, dalam praktiknya, terdapat masalah dalam kewenangan pengaturan dari peraturan pemerintah daerah (LGR), terutama terkait dengan dualisme kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>7</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini memiliki pergeseran fokus pada analisis mendalam tentang representasi sistem keadilan dan dualitas dalam penegakan hukum yang digambarkan dalam serial manga dan anime populer, *One Piece*. Di mana *One Piece*, karya Eiichiro Oda,<sup>8</sup> tidak hanya merupakan sebuah karya hiburan tetapi juga sarat dengan berbagai aspek sosial, politik, dan hukum yang menggambarkan berbagai dinamika keadilan dalam sebuah dunia fiksi. Oleh karena itu, penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, penelitian akan mengkaji bagaimana sistem keadilan diperankan dalam serial tersebut, dengan menjelaskan bagaimana hukum diterapkan terhadap berbagai karakter dan situasi. Dalam *One Piece*, ada berbagai contoh tentang bagaimana keadilan dijalankan, baik

---

<sup>5</sup> Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan," *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 345–53, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.

<sup>6</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Legal system study: Law enforcement perspectives," *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)* 5, no. 2 (2023): 243–48, <https://www.growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW/article/view/392>.

<sup>7</sup> Abdul Madjida, "Authority Dualism of Regional Law Enforcement in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 8 (2020): 1001–10, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_8/13872\\_Madjid\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_8/13872_Madjid_2020_E_R.pdf).

<sup>8</sup> Bagaskara Wijayakusuma Putera Dwipa, "The Voyage of A Heroic Pirate: Hero's Journey in Eiichiro Oda's *One Piece*," *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies* 10, no. 3 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.26740/lk.v10i3.54506>.

oleh pemerintah dunia, bajak laut, dan entitas lain, yang sering kali menunjukkan konflik dan kompromi antara moralitas pribadi dan hukum yang berlaku.

Kedua, penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif Siyasah Syar'iyah untuk menganalisis representasi sistem keadilan tersebut. Siyasah Syar'iyah, yang berarti politik atau kebijakan hukum Islam, memberikan kerangka untuk mengkaji sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada hukum sebagai sebuah sistem yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep dalam Siyasah Syar'iyah dapat diterapkan untuk memahami dan menilai sistem keadilan yang kompleks seperti yang digambarkan dalam One Piece. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman literatur mengenai keadilan dan penegakan hukum dalam konteks fiksi dan populer, tetapi juga menambahkan dimensi baru dalam studi hukum dan keadilan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam analisis interdisipliner antara hukum, budaya pop, dan studi Islam.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis dua permasalahan utama yang dikemukakan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku, jurnal, dan situs web yang relevan dengan objek kajian. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dengan teori Siyasah Syar'iyah, yang diolah secara deskriptif-analitik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat.

## **Pembahasan**

### **Genaologi Anime One Piece Karya Eiichiro Oda**

One Piece adalah sebuah karya monumental dalam genre manga dan anime yang diciptakan oleh Eiichiro Oda.<sup>9</sup> Manga ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 oleh Shueisha dalam majalah Weekly Shonen Jump dan terus berkembang hingga saat ini, menjadikannya salah satu serial terpanjang dan

---

<sup>9</sup> Mery Kharismawati dan Lufi Wahidati, "Nakama: Reception on the Audience of One Piece Anime by Eiichiro Oda," *ProTVF* 7, no. 2 (2023): 218–33, <https://doi.org/10.24198/ptvf.v7i2.41676>.

paling populer di dunia. Cerita ini berpusat pada petualangan epik seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy, yang bertekad kuat menjadi Raja Bajak Laut. Karakter utama, Luffy, memiliki kemampuan memanjangkan tubuhnya seperti karet setelah secara tidak sengaja memakan buah iblis, Gomu Gomu no Mi.<sup>10</sup>

Latar belakang cerita One Piece terinspirasi oleh gagasan kebebasan dan petualangan yang tak terbatas di lautan terbuka. Alur cerita dimulai dari keinginan Luffy untuk menjelajahi Grand Line, sebuah lautan penuh misteri dan bahaya, untuk menemukan "One Piece," harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris, Gol D. Roger. Selama perjalanannya, Luffy mengumpulkan kru yang beragam, yang masing-masing memiliki tujuan pribadi dan kemampuan unik. Kru ini, dikenal sebagai "Bajak Laut Topi Jerami," melibatkan diri dalam berbagai petualangan, menghadapi bajak laut lain, organisasi kriminal, dan bahkan pemerintah dunia.<sup>11</sup>

Struktur naratif One Piece juga dibangun melalui serangkaian busur cerita yang saling terkait, di mana setiap busur mengembangkan karakterisasi lebih lanjut dan menyajikan tantangan baru serta penemuan yang mengungkap aspek-aspek dari dunia yang luas dan kompleks yang diciptakan Oda. Tema utama yang melintasi seri ini meliputi persahabatan, impian, konflik moral, dan pertarungan antara kebebasan individu dengan kontrol yang represif. Oda meramu mitologi khusus dalam cerita, menggabungkan elemen fantastis dengan pelajaran kehidupan yang mendalam, memperkaya narasi dengan budaya dan sejarah fiktif yang kompleks.<sup>12</sup>

Di samping itu, One Piece juga mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik yang lebih besar, mengkritik korupsi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut dalam cerita. Seri ini secara efektif menggunakan genre petualangan untuk membahas topik berat seperti

---

<sup>10</sup> Muh Nur Rahmat Yasim, "Otaku Dadakan: Studi Kasus Penggemar Anime One Piece di Kalangan Mahasiswa," *Emik* 5, no. 1 (2022): 84–100, <https://doi.org/10.46918/emik.v5i1.1216>.

<sup>11</sup> Rahmat Yasim dkk., "Corak Corak Maritim dalam Anime One Piece," *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): 145–70, <https://doi.org/10.31947/jma.v1i2.24383>.

<sup>12</sup> Ahmad Rifqi, "Analisis Semiotika dan Representasi Rasisme Dalam Serial Anime One Piece," *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)* 3, no. 2 (2021): 16–27, <https://doi.org/10.26644/jko.v3i2.12032>.

diskriminasi, keadilan, dan kekuasaan.<sup>13</sup> Hal ini memberikan dimensi yang lebih dalam dan membuat One Piece tidak hanya sebagai kisah petualangan semata, tetapi juga sebagai kritik sosial yang menarik dan refleksi atas nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menyajikan narasi yang kaya dan kompleks, Oda menarik pembaca ke dalam dunia yang dihuni oleh karakter-karakter yang mereka dukung dan kisah-kisah yang resonan secara emosional.



**Gambar 1. Monkey D. Luffy dan Kru Bajak Lautnya<sup>14</sup>**

### **Sistem Keadilan dan Dualitas Penegakan Hukum dalam Serial One Piece**

Dalam dunia One Piece, karya Eiichiro Oda, sistem keadilan memegang peranan penting terhadap struktur pemerintahan dan penegakan hukum, khususnya dalam pemerintahan Angkatan Laut.<sup>15</sup> Angkatan Laut, yang beroperasi di bawah naungan Pemerintah Dunia, adalah institusi utama yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan eksekusi keadilan terhadap para pelanggar, terutama para bajak laut. Sistem

---

<sup>13</sup> Kharismawati dan Wahidati, "Nakama: Reception on the Audience of One Piece Anime by Eiichiro Oda."

<sup>14</sup> "Monkey D. Luffy dan Kru Bajak Lautnya," 2024, <https://images.app.goo.gl/WUx4PXjTwoq5Q3m1A>.

<sup>15</sup> Andheralvi Isaiah Lontoh dan Yudha Nugraha Manguju, "Kepemimpinan yang Menyelamatkan: Analisis Konsep Kepemimpinan Monkey D. Luffy dalam Anime One Piece Arc 'Marineford' dan Konsep Kepemimpinan Yesus Sebagai Sahabat," *TEOLOGIS-RELEVAN-APLIKATIF-CENDIKIA-KONTEKSTUAL* 2, no. 2 (2023): 59–75, <https://doi.org/10.61660/tep.v2i2.78>.



ini dirancang untuk menjaga stabilitas dan keamanan di seluruh lautan, sering kali melalui metode yang tegas dan terkadang brutal.<sup>16</sup>

Angkatan Laut One Piece diketuai oleh seorang Laksamana Besar dan di bawahnya terdapat beberapa laksamana yang membawahi berbagai divisi.<sup>17</sup> Hierarki ini tidak hanya menunjukkan struktur komando tetapi juga refleksi dari bagaimana keadilan diinterpretasikan dan diterapkan dalam skala yang berbeda. Mereka bertugas tidak hanya menghadapi bajak laut tetapi juga melindungi warga sipil dari ancaman-ancaman lain seperti pemberontakan atau kekuatan yang ingin menggulingkan Pemerintah Dunia. Selain Angkatan Laut, terdapat juga institusi lain seperti Cipher Pol, sebuah kelompok mata-mata yang bekerja langsung di bawah naungan Pemerintah Dunia. Cipher Pol beroperasi lebih dalam bayang-bayang, melakukan tugas-tugas yang sering kali berada di batas atau bahkan melampaui batas hukum yang umum diterima, seperti pembunuhan dan penyiksaan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi rahasia pemerintah dan memastikan keamanan negara dari ancaman internal maupun eksternal.<sup>18</sup>

Konsep keadilan dalam One Piece sering kali dipertanyakan, baik oleh karakter dalam cerita maupun oleh para penggemarnya. Hal ini karena tindakan Angkatan Laut dan Pemerintah Dunia yang kadang kala terlihat mengabaikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penanganan terhadap para bajak laut, misalnya, sering kali dilakukan dengan kekuatan yang berlebihan dan tanpa pengadilan yang adil, menggambarkan semacam "keadilan mutlak" yang tidak memberikan ruang untuk pembelaan atau pembenaran.<sup>19</sup> Melalui narasi tersebut, Oda mengkritisi konsep keadilan yang absolut dan monolitik, mengajak pemirsanya untuk mempertanyakan apa itu keadilan yang sebenarnya dan bagaimana seharusnya keadilan itu diterapkan. Hal ini merupakan tema yang kuat dan berulang dalam banyak arc cerita,

---

<sup>16</sup> "Marinir," *Wikia One Piece*, 2024, <https://onepiece.fandom.com/id/wiki/Marinir>.

<sup>17</sup> Ajith Kumar, "One Piece: Sistem Pemeringkatan Laut (Dijelaskan)," *beebom.com*, 31 Maret 2023, <https://beebom.com/one-piece-marine-ranking-system-explained/>.

<sup>18</sup> Thomas Zoth, "The politics of One Piece: political critique in Oda's Water Seven," vol. 3 (Forum for World Literature Studies, Wuhan Guoyang Union Culture & Education Company, 2011), 107–18, <https://www.academia.edu/download/34869197/Scherr-FWLS.pdf#page=116>.

<sup>19</sup> Arya Nenggala, "5 Kebusukan Terbesar Pemerintah Dunia dalam One Piece, Tirani!," *IDN TIMES*, Desember 2022, <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/arya-nenggala/kebusukan-terbesar-pemerintah-dunia-dalam-one-piece-c1c2>.



sering kali melalui interaksi karakter-karakter utama dengan sistem keadilan yang ada, dan menggambarkan kompleksitas serta ambiguitas moral yang terlibat dalam penegakan hukum di dunia yang fantastis namun terasa nyata tersebut.

Hal lainnya yang penting untuk dipahami adalah peran dari Tenryuubito atau "Naga Langit". Mereka adalah para bangsawan yang merupakan keturunan dari para pendiri Pemerintah Dunia, dan memiliki kebebasan yang nyaris mutlak serta kekebalan dari hukum yang berlaku untuk rakyat biasa. Keberadaan Tenryuubito menambah lapisan kompleksitas pada struktur keadilan di dunia One Piece, karena mereka sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi terhadap yang lain, dilindungi oleh hukum dan kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun.<sup>20</sup> Faktor lain yang mempengaruhi keadilan di dunia One Piece adalah keberadaan Yonko, empat bajak laut terkuat di dunia. Meski secara teknis adalah pelanggar hukum, Yonko memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk membuat aturan mereka sendiri, sering kali menyaingi bahkan Angkatan Laut itu sendiri.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan dualitas dalam penegakan hukum, di mana keadilan bisa tergantung pada kekuatan dan pengaruh seseorang, bukan pada prinsip hukum yang universal dan adil.

Penjara Impel Down, sebagai fasilitas penahanan utama dalam dunia One Piece, juga merupakan simbol dari sistem keadilan yang keras. Penjara ini diisi dengan berbagai tingkat keamanan, di mana tahanan mengalami berbagai bentuk hukuman yang berat.<sup>22</sup> Penggambaran penjara ini menekankan pandangan kritis terhadap bagaimana keadilan sering kali lebih fokus pada penghukuman daripada rehabilitasi, sebuah tema yang sering diangkat dalam cerita-cerita penjara di seluruh dunia. Pada akhirnya, melalui cerita-cerita yang berfokus pada interaksi antara Angkatan Laut, bajak laut, dan berbagai faktor lainnya, One Piece tidak hanya menghibur tapi juga mengajak pemirsanya untuk merenung tentang ketidakadilan dalam sistem keadilan nyata. Eiichiro Oda dengan cerdas menggunakan dunia fiksi untuk

---

<sup>20</sup> Rifqi, "Analisis Semiotika dan Representasi Rasisme Dalam Serial Anime One Piece."

<sup>21</sup> Yasim dkk., "Corak Corak Maritim dalam Anime One Piece."

<sup>22</sup> Rizki Oktavian, "Eksplorasi Penjara Impel Down di Dunia One Piece - Mengungkap Misteri dari Level Terendah hingga Newkama di Level 5.5," *BERITABARU.CO*, 14 Januari 2024, <https://jogja.beritabaru.co/eksplorasi-penjara-impel-down-di-dunia-one-piece-mengungkap-misteri-dari-level-terendah-hingga-newkama-di-level-5-5/>.

menggugat sistem-sistem yang ada, mempertanyakan legitimasi dari apa yang sering dianggap sebagai "keadilan" dan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, apa yang dianggap "benar" dan "adil" bisa sangat subjektif dan tergantung pada perspektif.

### **Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Keadilan dan Tata Kelola Hukum dalam Dunia One Piece**

Analisis sistem keadilan dalam anime One Piece, yang diperkasai oleh Eiichiro Oda,<sup>23</sup> melalui lensa teori siyasah syar'iyah, mengungkapkan suatu wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum dan keadilan dapat dimanifestasikan dalam struktur pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam konteks siyasah syar'iyah, yang merupakan cabang dari hukum Islam dengan berfokus pada tata kelola dan administrasi keadilan, prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan masyarakat sangat ditekankan.<sup>24</sup> Analisis dimulai dari struktur keadilan di One Piece yang diwakili oleh Angkatan Laut dan berada di bawah Pemerintah Dunia, mencerminkan sebuah model penegakan hukum yang sangat hierarkis dan terpusat.<sup>25</sup> Dalam siyasah syar'iyah, penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan yang adil dan universal tidak hanya mencakup hukuman bagi pelanggar, tetapi juga perlindungan dan keadilan bagi semua warga.<sup>26</sup> Namun, dalam narasi One Piece, Angkatan Laut sering kali mengimplementasikan hukuman yang keras dan absolut tanpa proses pengadilan yang adil,<sup>27</sup> sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Keberadaan Cipher Pol sebagai agen rahasia yang beroperasi di luar batas hukum normal juga menunjukkan praktik kebijakan yang berbahaya dalam siyasah syar'iyah. Dalam teori ini, penggunaan kekuasaan harus selalu transparan dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kegiatan Cipher Pol yang mencakup pembunuhan dan penyiksaan menunjukkan ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif dan adanya

---

<sup>23</sup> Dwipa, "The Voyage of A Heroic Pirate: Hero's Journey in Eiichiro Oda's One Piece."

<sup>24</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Lebanon: Beirut, 1996).

<sup>25</sup> Ajith Kumar, "One Piece: Sistem Pemeringkatan Laut (Dijelaskan)."

<sup>26</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*.

<sup>27</sup> "Marinir."

pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan,<sup>28</sup> yang menuntut bahwa semua tindakan harus dilakukan dengan pertimbangan etis dan moral.<sup>29</sup> Selain itu, konsep "keadilan mutlak" yang dijalankan oleh Pemerintah Dunia dan Angkatan Laut sering kali mengesampingkan pertimbangan kasus per kasus,<sup>30</sup> yang penting dalam hukum Islam. Dalam siyasah syar'iyah, tiap kasus harus dianalisis berdasarkan konteks dan keadaan spesifik untuk memastikan bahwa keadilan yang diberikan adalah yang paling sesuai dan adil.<sup>31</sup> Hal ini bertentangan dengan praktik yang digambarkan di One Piece, di mana "keadilan" sering kali diputuskan melalui kekuatan dan kebijakan yang monolitik, mengabaikan nuansa individual dan situasi spesifik yang mempengaruhi pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, keberadaan Tenryuubito dan Yonko menunjukkan adanya ketimpangan dalam keadilan sosial dan hukum,<sup>32</sup> yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Dalam teori ini, tidak ada seorang pun yang seharusnya di atas hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip yang tidak bisa ditawar.<sup>33</sup> Kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Tenryuubito dan Yonko menghasilkan praktik keadilan yang bersifat partikelir dan subjektif, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam struktur keadilan yang ideal.

Berdasarkan analisis di atas, sistem keadilan dalam narasi One Piece menunjukkan bahwa kekuatan media fiksi dalam membuka diskusi mendalam mengenai isu-isu keadilan yang serius dan relevan bagi masyarakat nyata. Memahami penggambaran sistem keadilan di One Piece melalui prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana idealnya sebuah sistem keadilan yang adil dan efektif harus dioperasikan, dengan penekanan kuat pada keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban.

---

<sup>28</sup> Zoth, "The politics of One Piece: political critique in Oda's Water Seven."

<sup>29</sup> Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.

<sup>30</sup> Arya Nenggala, "5 Kebusukan Terbesar Pemerintah Dunia dalam One Piece, Tirani!"

<sup>31</sup> Usman Jafar, "Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syar'iyah)," *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 76–84, <https://core.ac.uk/download/pdf/234744786.pdf>.

<sup>32</sup> Rifqi, "Analisis Semiotika dan Representasi Rasisme Dalam Serial Anime One Piece."

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Surakarta: Kencana, 2016).

Sebagai refleksi dari realitas yang kompleks dan seringkali tidak adil, *One Piece* menantang para penontonnya untuk memikirkan ulang tentang apa arti keadilan sejati, dan bagaimana sistem keadilan yang ada dan mungkin tidak selalu mencerminkan nilai-nilai etis dan moral yang harusnya mereka junjung. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk merenungkan praktik keadilan mereka sendiri dan berusaha ke arah reformasi yang memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau kekuatan, diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum.

Pada akhirnya, melalui karya-karya seperti "*One Piece*," para penontonnya diajak untuk tidak hanya terlibat secara pasif sebagai konsumen cerita, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam diskusi sosial yang lebih besar tentang bagaimana untuk dapat bekerja sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Cerita-cerita tersebut, meskipun berada dalam kerangka dunia yang fantasi, menawarkan pelajaran penting dan terus relevan mengenai pentingnya keadilan dan integritas dalam penegakan hukum dan administrasi keadilan.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah, sistem keadilan dan penegakan hukum dalam serial *One Piece* menunjukkan bahwa karya Eiichiro Oda tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan kritik tajam terhadap praktik keadilan yang ada. Dalam narasi *One Piece*, Angkatan Laut dan Pemerintah Dunia sering kali mengimplementasikan tindakan keadilan yang absolut dan monolitik, serta cenderung mengabaikan proses hukum yang adil dan hak asasi manusia. Sistem keadilan yang dijalankan menggambarkan penggunaan kekuasaan yang sering kali brutal dan tanpa pertimbangan etis, mencerminkan praktik keadilan yang bias dan tidak merata. Hal ini digugat melalui berbagai arc cerita yang menunjukkan betapa keadilan sering kali lebih tergantung pada kekuatan dan pengaruh individu daripada prinsip-prinsip hukum yang adil dan universal.

Selanjutnya, melalui analisis dengan menggunakan lensa teori siyasah syar'iyah, terlihat bahwa sistem keadilan dalam *One Piece* sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Penggambaran Cipher Pol dan

tindakan mereka yang beroperasi di luar batas hukum konvensional menunjukkan ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kehadiran Tenryuubito dan Yonko, yang menunjukkan ketimpangan dalam keadilan sosial dan hukum, menggarisbawahi bagaimana kekuatan dan status sosial dapat mengubah penafsiran dan penerapan keadilan. Dengan memanfaatkan dunia fantasi, One Piece berhasil mengajak pemirsa untuk merenungkan tentang ketidakadilan dalam sistem keadilan nyata dan menantang mereka untuk berpikir kritis tentang apa itu keadilan sejati. Kisah ini menginspirasi diskusi mendalam tentang nilai keadilan dan reformasi hukum, menggarisbawahi pentingnya sebuah sistem keadilan yang adil dan inklusif yang menjamin keadilan tidak hanya dalam teori tapi juga dalam praktik. Melalui karya ini, Oda tidak hanya mengkritik tetapi juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam pembentukan sistem hukum yang lebih adil dan etis.

## **Daftar Pustaka**

- Abu al-Hasan al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Lebanon: Beirut, 1996.
- Ajith Kumar. "One Piece: Sistem Pemeringkatan Laut (Dijelaskan)." *beebom.com*, 31 Maret 2023. <https://beebom.com/one-piece-marine-ranking-system-explained/>.
- Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.
- Arya Nenggala. "5 Kebusukan Terbesar Pemerintah Dunia dalam One Piece, Tirani!" *IDN TIMES*, Desember 2022. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/arya-nenggala/kebusukan-terbesar-pemerintah-dunia-dalam-one-piece-c1c2>.
- Dwipa, Bagaskara Wijayakusuma Putera. "The Voyage of A Heroic Pirate: Hero's Journey in Eiichiro Oda's One Piece." *LITERA KULTURA: Journal of Literary and Cultural Studies* 10, no. 3 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.26740/lk.v10i3.54506>.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Legal system study: Law enforcement perspectives." *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)* 5, no. 2 (2023): 243–48. <https://www.growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW/article/view/392>.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Surakarta: Kencana, 2016.
- Jafar, Usman. “Negara dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasa Syar’iyah).” *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 76–84. <https://core.ac.uk/download/pdf/234744786.pdf>.
- Kharismawati, Mery, dan Lufi Wahidati. “Nakama: Reception on the Audience of One Piece Anime by Eiichiro Oda.” *ProTVF* 7, no. 2 (2023): 218–33. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v7i2.41676>.
- Kushadianto, Miftaful Murachim Budy, dan Marsudi Dedi Putra. “Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum.” *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1476–84. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah, dan Yudha Nugraha Manguju. “Kepemimpinan yang Menyelamatkan: Analisis Konsep Kepemimpinan Monkey D. Luffy dalam Anime One Piece Arc ‘Marineford’ dan Konsep Kepemimpinan Yesus Sebagai Sahabat.” *TEOLOGIS-RELEVAN-APLIKATIF-CENDIKIA-KONTEKSTUAL* 2, no. 2 (2023): 59–75. <https://doi.org/10.61660/tep.v2i2.78>.
- Madjida, Abdul. “Authority Dualism of Regional Law Enforcement in Indonesia.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 8 (2020): 1001–10. [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_8/13872\\_Madjid\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_8/13872_Madjid_2020_E_R.pdf).
- “Monkey D. Luffy dan Kru Bajak Lautnya.” 2024. <https://images.app.goo.gl/WUx4PXjTwoq5Q3m1A>.
- Rifqi, Ahmad. “Analisis Semiotika dan Representasi Rasisme Dalam Serial Anime One Piece.” *Jurnal Komunikasi dan Organisasi (J-KO)* 3, no. 2 (2021): 16–27. <https://doi.org/10.26644/jko.v3i2.12032>.
- Rizki Oktavian. “Eksplorasi Penjara Impel Down di Dunia One Piece - Menguak Misteri dari Level Terendah hingga Newkama di Level 5.5.” *BERITABARU.CO*, 14 Januari 2024. <https://jogja.beritabaruc.co/eksplorasi-penjara-impel-down-di-dunia-one-piece-menguak-misteri-dari-level-terendah-hingga-newkama-di-level-5-5/>.
- Ruman, Yustinus Suhardi. “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan.” *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 345–53. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.
- Sugitanata, Arif, dan Ihda Shofiyatun Nisa. “Analisis Masalah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk.” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 69–77. <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>.

- Tamir, Michal. "Public Law as a Whole and Normative Duality: Reclaiming Administrative Insights in Enforcement Review." *Tex. J. on CL & CR* 12, no. 1 (2006): 1–52. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1011404](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1011404).
- Wibowo, Agung, dan Arif Sugitanata. "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.
- Wikia *One Piece*. "Marinir." 2024. <https://onepiece.fandom.com/id/wiki/Marinir>.
- Yasim, Muh Nur Rahmat. "Otaku Dadakan: Studi Kasus Penggemar Anime One Piece di Kalangan Mahasiswa." *Emik* 5, no. 1 (2022): 84–100. <https://doi.org/10.46918/emik.v5i1.1216>.
- Yasim, Rahmat, Pawennari Hijjang, Hardiyanti Munsu, Safriadi Safriadi, dan Munsu Lampe. "Corak Corak Maritim dalam Anime One Piece." *Jurnal Mahasiswa Antropologi* 1, no. 2 (2022): 145–70. <https://doi.org/10.31947/jma.v1i2.24383>.
- Zoth, Thomas. "The politics of One Piece: political critique in Oda's Water Seven," 3:107–18. Wuhan Guoyang Union Culture & Education Company, 2011. <https://www.academia.edu/download/34869197/Scherr-FWLS.pdf#page=116>.